

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan sebuah istilah dalam lapangan hukum yang mempunyai lebih dari satu pengertian, namun pada esensinya maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satupun rumusan diantara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.¹ Menurut Prof. Dr. W.L.G Lemaire, *“hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk Undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana suatu hal keharusan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”*.²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perlu untuk diketahui syarat-syarat atau asas-asas hukum yang umumnya diterima. Syarat-syarat ini dinamakan unsur-unsur tindak pidana yang diperlukan untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Bagian umum kitab Undang-Undang

¹ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 1

² Ibid hal. 2

mengajukan sebagai syarat untuk dapat dipidananya seorang pelaku yaitu pertama bahwa perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan, kedua perbuatan itu dapat disesalkan pada si pelaku (penyesalan dari perbuatan) dan ketiga perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum.³

Hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa artinya penggunaannya bersifat *ultimum remedium* dan digunakan secara selektif dan limitatif, KUHP di Indonesia mengatur masalah perzinaan menjadi sebuah delik pidana pengaturannya terdapat dalam pasal 284, 287, dan 288 KUHP, akan tetapi terbatas pada pelaku yang telah terikat pernikahan saja dan harus diawali dengan pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan (delik aduan).⁴

Perlu diketahui juga bahwa, terdapat beberapa bentuk tindak pidana kejahatan dalam KUHP, salah satunya adalah kejahatan terhadap keasusilaan. Dalam tindak pidana kejahatan terhadap keasusilaan dikenal juga dengan perbuatan perzinaan. Dalam pasal 284 ayat (1) KUHP “*Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan: ke-1 a. seorang pria telah nikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; b. seorang wanita telah nikah yang melakukan zina. Ke-2 a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah; b. seorang wanita tidak nikah yang turut serta*

³ M. J. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1 (hukum pidana material bagian umum)*, Bandung: Binacipta, hal. 99

⁴ Dian Andriasari, “*Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki*”, Jurnal Syiar Hukum, nomor 3, November 2011, hal. 270

*melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan pasal 27 BW berlaku baginya”.*⁵

Pidana memandang pengertian zina dalam pasal 284 ayat (1) KUHP yaitu bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Menurut hukum, baru dikatakan persetubuhan apabila bagian kelamin pria telah masuk kedalam lubang kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani.⁶

Tidak termasuk dalam pengertian perzinaan, yaitu persetubuhan yang dilakukan dengan seorang wanita dengan mendapat persetujuan dari suami wanita itu. Perbuatan mana bukan merupakan pencemaran terhadap kesetiaan dalam perkawinan. Dalam hal ini, suami tersebut adalah seorang germo yang telah membuat istrinya menjadi pelacur dan menyetujui perbuatannya atau cara hidupnya tanpa batasan. Kejahatan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari suami atau istri. Tidak termasuk kedalam pengertian zina apabila seorang melakukan hubungan badan dengan sesama jenis atau berhubungan seksual dengan binatang.⁷

Dalam pasal 284 ayat (2) KUHP *“tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi*

⁵ Moelyatno, 2008 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: bumi aksara, hal. 104

⁶ R. Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya* (cetakan ke IV), Surabaya: Usaha Nasional, hal. 300

⁷ P.A.F Lamintang & C. Djisman Samosir, 1985, *Hukum Pidana Indonesia* (cetakan ke II), Bandung: Sinar Baru, hal. 175

mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan di ikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur dikarenakan alasan itu juga".⁸ Dalam ilmu pidana dikenal dengan dua kategori delik yaitu delik biasa dan delik aduan. Dalam pasal 284 ayat (2) KUHP tersebut dikategorikan sebagai delik aduan. Delik aduan adalah salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam rumusan delik dengan tegas dinyatakan, bahwa pidana ini hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari yang berkepentingan.⁹

Jadi menurut pasal 284 KUHP, Perbuatan dikategorikan sebagai tindakan pidana zina salah seorang pelakunya harus terikat perkawinan dan berlaku ketentuan pasal 27 BW. Penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan apabila ada pengaduan (*absolut*) dari pihak yang dirugikan, yang diikuti dengan perceraian atau pisah tempat tidur dan meja makan.¹⁰

Perzinaan dari tahun ke tahun semakin meningkat, menurut Rahmadani Hidayatin dalam forum Gerakan Sehat Masyarakat bahwa pada tahun 1995 sekitar 11,5 persen anak usia 15 hingga 17 tahun sudah pernah melakukan hubungan seksual, sekitar 65,3 persen remaja usia 18 tahun sampai 20 tahun sudah melakukan hubungan seksual, usia 21 hingga 23 tahun sebanyak 19,2 persen dan usia diatas 23 tahun sebanyak 3,8 persen.¹¹ Pada tahun 2002 di Yogyakarta, lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan serta Pusat

⁸ Moelyatno, Loc. Cit.

⁹ Wempi Jh. Kumendong, "Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan", Jurnal Hukum Unsrat, nomor 9, (April 2017), hal. 53

¹⁰ Dian Andriasari, Loc. Cit

¹¹ Kompas.com, Sabtu 31 Juli 2010, 21:54: *Pergaulan Bebas Remaja Mengkhawatirkan*, dalam I <https://regional.kompas.com/read/2010/07/31/21544680/about.html> diunduh Selasa 30 Oktober 2018 pukul 10:33

Pelatihan Bisnis dan Humaniora (LSCK PUSBIH) hasil penelitian menunjukkan hampir 97,05 persen mahasiswi di Yogyakarta sudah hilang keperawanannya saat kuliah.¹² Pada tahun 2010, Komisi Perlindungan Anak (KPA) mengungkapkan 62,7 persen remaja pernah melakukan hubungan badan, menurut Tifatul dalam siaran persnya bahwa Survei KPA yang dilakukan terhadap 4.500 remaja di 12 kota besar seluruh Indonesia menemukan 93 persen remaja pernah berciuman, 62,7 persen pernah berhubungan badan dan 21 persen remaja telah melakukan aborsi.¹³ Pada tahun 2013, berdasarkan survei dari Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Kesehatan bahwa 62,7 persen remaja Indonesia telah melakukan hubungan seks diluar nikah, 20 persen dari 94.270 perempuan usia remaja mengalami hamil diluar nikah.¹⁴ Pada bulan februari 2014, menurut data dari Buklet Cinta Mulia yang diproduksi oleh Al-Fatih Studio 54 persen remaja di kota Bandung mengaku sudah pernah melakukan hubungan seksual, sedangkan Jakarta 51 persen , suarabaya 47 persen dan medan 52 persen.¹⁵

¹² Merdeka.com, 10 Februari 2014, 00:30: *Seks Bebas Mahasiswa Yogya, Bebas Bawa Pasangan Masuk Kos-kosan*, dalam <https://m.merdeka.com/peristiwa/seks-bebas-mahasiswa-yogya-bebas-bawa-pasangan-masuk-kos-kosan.html> diunduh Selasa 30 Oktober 2018 pukul 10:45

¹³ Kompas.com, Minggu 9 Mei 2010, 19:00: *62,7 Persen Remaja Indonesia Pernah ML*, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2010/05/09/19005745/62.7.Persen.Remaja.Indonesia.%20Pernah.M> diunduh Selasa 30 Oktober 2018 pukul 11:00

¹⁴ Kompasiana.com, 28 Desember 2014, 00:50: *63 Persen Remaja di Indonesia Melakukan Seks Pra Nikah*, dalam https://www.kompasiana.com/rumahbelajar_persada/54f91d77a33311fc078b45f4/63-persen-remaja-di-indonesia-melakukan-seks-pra-%20nikah diunduh Selasa 30 Oktober 2018 pukul 11:15

¹⁵ Hidayatullah.com, Selasa 11 Februari 2014, 21:22: *54% Remaja Bandung Pernah Berhubungan Seks*, dalam <https://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/02/11/16330/54-remaja-bandung-pernah-berhubungan-seks.html> diunduh Selasa 30 Oktober 2018 pukul 11:30

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa angka-angka kasus zina di Indonesia masih tergolong tinggi. Hal itu disebabkan beberapa faktor yaitu faktor pendidikan, moral, dan khususnya posisi hukum yang lemah. Salah satunya yaitu tidak jelasnya posisi pelaku zina dan daya efek jera dalam sanksi hukum terhadap para pelaku perzinaan.

Seperti pada kasus diwilayah hukum kota Surabaya provinsi Jawa Timur yakni pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor: 1627/Pid.B/2013/PN.Sby, terdapat pula pada kasus diwilayah hukum tobelo kabupaten Halmahera utara yakni pada putusan Pengadilan Negeri Tobelo dengan nomor: 08/PID.B/2012/PN.TBL, dan pada kasus di wilayah hukum Pangkalpinang yakni pada putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan nomor: 249/Pid.B/2013/PN.PKP, melihat kasus yang terdapat dalam tiga putusan tersebut tergolong menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dikarenakan terdapat perbedaan posisi pelaku terdakwa yaitu terdakwa sebagai pelaku zina dan terdakwa lain yang dinyatakan sebagai pelaku turut serta dalam perzinaan. Terkait dengan adanya perbedaan posisi pelaku itu, penulis menitik beratkan penelitian ini terhadap pelaku turut serta dalam perzinaan tanpa menghilangkan pembahasan terkait posisi pelaku zina agar dapat diketahui secara jelas dan tegas posisi pelaku turut serta dalam perzinaan dengan membandingkan istilah pelaku zina.

Kemudian, dalam hal penjatuhan sanksi oleh hakim dalam tiga putusan tersebut terdapat juga perbedaan sanksi hukum dalam amar

putusannya. Sehingga perlu diteliti lebih lanjut terkait perbedaan amar putusan bisa jadi disebabkan oleh peran pelaku dalam perbuatan tersebut. Oleh karena itu menurut hemat penulis perlu dilakukan penelitian tentang masalah tersebut dengan mengambil judul turut serta dalam perzinaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep turut serta dalam tindak pidana perzinaan berdasarkan putusan hakim?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap turut serta dalam tindak pidana perzinaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis konsep turut serta dalam tindak pidana perzinaan
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap turut serta dalam tindak pidana perzinaan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

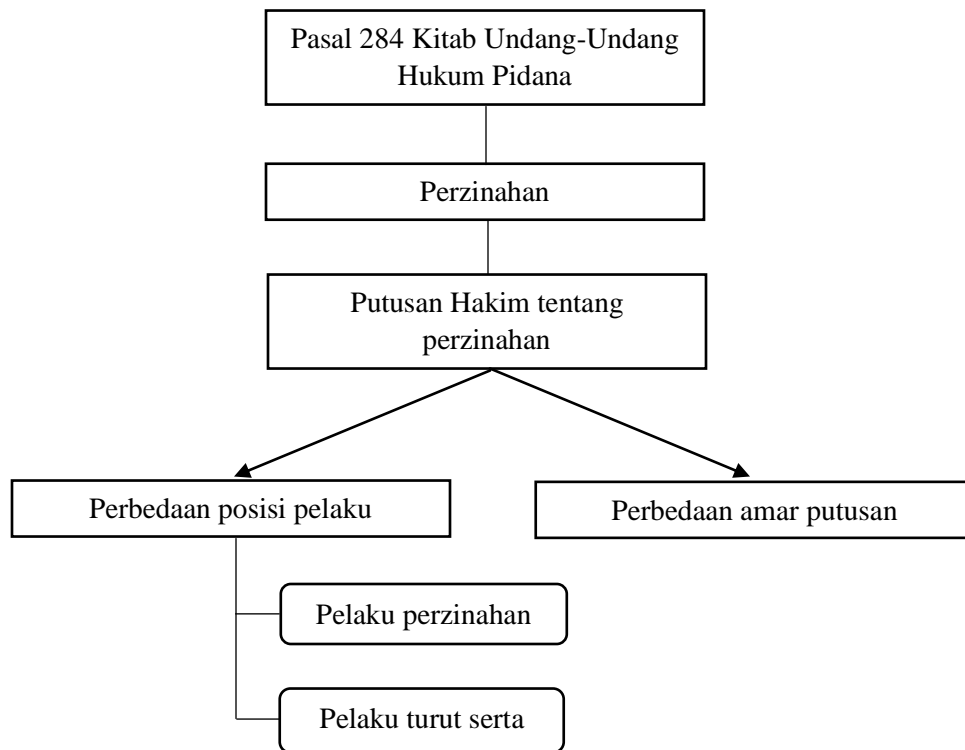
- a. Memberikan kontribusi pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum pidana mengenai konsep turut serta dalam tindak pidana perzinaan dan perbedaan amar putusan dalam menjatuhkan putusan terhadap turut serta dalam tindak pidana perzinaan.

- b. Menambah referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan, khususnya terkait dengan bentuk turut serta dalam tindak pidana perzinaan dan perbedaan amar putusan dalam menjatuhkan putusan terhadap turut serta dalam tindak pidana perzinaan.

2. Manfaat Praktis

1. Dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti penulis serta dapat mengembangkan cara berpikir, penalaran dan pengetahuan penulis dalam menyusun suatu penulisan hukum.
2. Dapat menjadi masukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan bentuk turut serta dalam tindak pidana perzinaan dan terkait perbedaan amar putusan dalam menjatuhkan putusan terhadap turut serta dalam tindak pidana perzinaan.

E. Kerangka Pemikiran



Pasal 284 ayat (1) KUHP “*Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan: ke-1a. seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; b. seorang wanita telah menikah yang melakukan zina. Ke-2 a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah; b. seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya*”.¹⁶

¹⁶ Moelyatno, Loc. Cit.

Dalam pasal 284 ayat (2) KUHP *“tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan di ikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur dikarenakan alasan itu juga”*.¹⁷

Dalam pasal 284 ayat (2) KUHP tersebut dikategorikan sebagai delik aduan. Delik aduan adalah salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam rumusan delik dengan tegas dinyatakan, bahwa pidana ini hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari yang berkepentingan.¹⁸

Setiap kasus kejahatan dalam perbuatan perzinahan yang masuk kedalam Pengadilan atas pengaduan dari pihak yang terkait selalu berakhir dengan putusan pengadilan.

Putusan hakim selalu memperhatikan dan mempertimbangkan posisi pelaku yaitu apakah benar merupakan tersangka ataupun korban. Dalam prakteknya, setiap kasus perzinahan terdapat perbedaan posisi pelaku yaitu pelaku perzinahan dan/atau pelaku turut serta dalam perzinahan. Seperti dalam beberapa putusan pengadilan yaitu putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor: 1627/Pid.B/2013/PN.Sby, terdapat pula pada kasus di wilayah hukum tobelo kabupaten Halmahera utara yakni pada putusan Pengadilan Negeri Tobelo dengan nomor: 08/PID.B/2012/PN.TBL, dan pada kasus di wilayah hukum Pangkalpinang yakni pada putusan Pengadilan

¹⁷ Ibid

¹⁸ Wempi Jh. Kumendong, Loc. Cit

Negeri Pangkalpinang dengan nomor: 249/Pid.B/2013/PN.PKP. Ketiga putusan tersebut juga terdapat perbedaan isi amar dalam putusannya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis mengkaji dengan metode pendekatan Doktrinal (Normatif). Karena penulis akan mengkaji tentang putusan pengadilan nomor: 1627/Pid.B/2013/PN.Sby, 08/PID.B/2012/PN.TBL, dan 249/Pid.B/2013/PN.PKP tentang perzinaan untuk menunjukkan konsep turut serta dalam perzinaan dengan mendasarkan pada turut serta dalam KUHP

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif, karena penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara rinci mengenai turut serta dalam perzinaan dan putusan-putusan pengadilan negeri yang terkait tentang itu untuk kemudian dapat diperoleh analisa dan fakta secara cermat dan jelas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap turut dalam perzinaan.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Sekunder, meliputi:

1) Bahan hukum primer yang terdiri dari :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Putusan-putusan Pengadilan Negeri meliputi:
 - Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor: 1627/Pid.B/2013/PN.Sby.
 - Putusan Pengadilan Negeri Tobelo nomor: 08/PID.B/2012/PN.TBL
 - Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang nomor: 249/Pid.B/2013/PN.PKP

2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- a) Buku ilmiah, jurnal dan/atau referensi yang relevant dengan masalah yang diteliti.
- b) Naskah dari media masa

3) Bahan hukum tersier seperti Ensiklopedia, Kamus hukum atau kamus Bahasa Indonesia

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, pertama menggunakan study kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisa Data

Kemudian menganalisis data secara kualitatif, yaitu teknik analisis data dengan menganalisis data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan turut serta dalam tindak pidana perzinahan.

G. Sistematika Laporan Penelitian

Penulisan hasil penelitian ini dipaparkan dalam bentuk bab per bab dengan urutan sebagai berikut :

Bab I ini nantinya akan dipaparkan terkait dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Metode Penelitian serta Sistematika Penelitian.

Bab II ini berisi tentang Kajian Pustaka yang terdiri dari Subbab meliputi Syarat Pidanaan, Konsep Perzinahan menurut (Hukum pidana, Para ahli dan Hukum islam), Turut serta dalam Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Islam

Bab III tentang hasil Penelitian dan Pembahasan yang ini merupakan jawaban dari Rumusan Masalah Penelitian, Sehingga Subbabnya meliputi: Hasil Penelitian yang Mengkualifikasi Putusan Perkara nomor: 08/PID.B/2012/PN.TBL, 08/PID.B/2012/PN.TBL, 249/Pid.B/2013/PN.PKP meliputi: Identitas Terdakwa, Kasus Posisi, Dakwaan, Pertimbangan Hakim, Hal yang memberatkan dan meringankan dan Putusan. Kemudian

Pembahasan berupa Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap turut serta dalam tindak pidana perzinaan dan Konsep turut serta dalam tindak pidana perzinaan berdasarkan putusan hakim.

Terakhir Bab IV Penutup yang berisi Tentang Kesimpulan dari hasil Penelitian serta saran atau rekomendasi.